

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut Suparlan (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya

mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Pembangunan adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkemakmuran melalui pembangunan perekonomian untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah melihat seberapa efektif penggunaan sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berarti produksi barang jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja yang banyak untuk memproduksi barang jasa sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan akan semakin menurun.

Menurut Simatupang dan Dermoredjo (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah pengangguran dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah pengangguran merupakan salah satu strategi atau instrumen pembangunan yang selalu dikumandangkan oleh banyak pemimpin suatu negara tak terkecuali Indonesia, mengingat sangat kompleks permasalahannya di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat menghambat kesejahteraan dan peradaban. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Banten Tahun 2010 – 2018 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	11,14	9,80	9,28	10,25	9,50	10,43	9,74	9,61
2	Kab. Lebak	10,38	9,20	8,63	9,50	9,17	9,97	8,64	8,41
3	Kab. Tangerang	7,18	6,42	5,71	5,78	5,26	5,71	5,39	5,18
4	Kab. Serang	6,34	5,63	5,28	5,02	4,87	5,09	4,63	4,30
5	Kota Tangerang	6,88	6,14	5,56	5,26	4,91	5,04	4,95	4,76
6	Kota Cilegon	4,46	3,98	3,82	3,99	3,81	4,10	3,52	3,25
7	Kota Serang	7,03	6,25	5,70	5,92	5,70	6,28	5,57	5,36
8	Kota Tangerang Selatan	1,67	1,50	1,33	1,75	1,68	1,69	1,76	1,68
9	Banten	7,02	6,26	5,71	5,89	5,51	5,90	5,45	5,24

Sumber: BPS Banten (data diolah)

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten tingkat Kabupaten/kota memperlihatkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Tabel 1.1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/ kota di Provinsi Banten dari tahun ke tahun. Meski demikian, penurunan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten cenderung lambat. Bahkan, di kota Tangerang Selatan, tingkat kemiskinan meningkat dari 1,67% pada tahun 2010 menjadi 1,68% pada tahun 2018.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang

tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Menurut Sukirno (2000), pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran dapat menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Banten Tahun 2010-2018 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	11,34	11,32	9,30	12,34	7,03	10,22	8,30	8,33
2	Kab. Lebak	13,35	12,10	9,07	7,23	9,57	10,74	8,88	7,69
3	Kab. Tangerang	14,01	14,42	11,46	11,94	8,45	9,00	10,57	9,70
4	Kab. Serang	16,19	13,29	12,96	13,69	14,76	14,80	13,00	12,77
5	Kota Tangerang	14,09	12,89	8,31	8,62	7,81	8,00	7,16	7,40
6	Kota Cilegon	19,84	13,14	11,31	7,16	11,83	12,00	11,88	9,33
7	Kota Serang	17,11	13,84	10,80	11,29	10,03	9,49	8,43	8,16
8	Kota Tangerang Selatan	8,22	11,98	8,07	4,56	6,92	6,13	6,83	4,67
9	Banten	13,68	13,06	10,13	9,90	9,07	9,55	9,28	8,52

Sumber: BPS Banten (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Banten. Secara umum, tingkat pengangguran di Provinsi Banten cenderung menurun dari tahun 2010-2018. Meski demikian, selama enam tahun terakhir, penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Banten cenderung melambat. Beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Banten juga mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir, seperti kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang (2010-2018) dan kota Tangerang (2017-2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih perlu

adanya pembenahan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan untuk mengentaskan pengangguran.

Selain pengangguran, pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi disuatu daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat/masyarakat melalui bermacam-macam program yang telah dibuat. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta (Suparmoko, 1998). Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan bagaimana efeknya akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Banten Tahun 2010-2018 (Milyar Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	899,53	1177,38	1266,82	1530,14	1640,02	2037,03	2537,86	2456,84
2	Kab. Lebak	891,42	1172,21	1274,59	1514,84	1725,54	2092,70	2481,36	2446,81
3	Kab. Tangerang	1639,91	2027,97	2709,39	3277,53	3512,79	4179,07	4981,82	5878,84
4	Kab. Serang	881,97	1173,74	1413,90	1706,38	1909,37	2342,22	2742,00	2998,10
5	Kota Tangerang	1474,98	1635,67	1925,25	2766,42	2656,09	3101,03	3896,05	4288,01
6	Kota Cilegon	621,38	840,41	876,69	1002,11	1222,80	1464,01	1758,16	1590,09
7	Kota Serang	461,83	704,44	754,83	864,29	949,97	1061,92	1330,49	1227,87
8	Kota Tangerang Selatan	686,33	1289,44	1743,19	1837,73	6128,94	2621,24	2967,63	3271,44

Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (data diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya

dari tahun 2010 sampai tahun 2018 pemerintah kabupaten/kota di Banten selalu meningkatkan jumlah pengeluarannya. Peningkatan tersebut lazim dilakukan setiap daerah untuk meningkatkan dan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakatnya yang salah satunya bertujuan untuk kemajuan daerahnya. Dari delapan kabupaten di Provinsi banten, pemerintah kabupaten Tangerang selalu memiliki pengeluaran terbesar sejak tahun 2010-2018 di banding dengan daerah lainnya, Di urutan ke-2 ada Kota Tangerang dengan pengeluaran terbesar, sedangkan Kota Serang menjadi daerah dengan tingkat pengeluaran pemerintah terkecil, lalu disusul Kota Cilegon sebagai daerah dengan pengeluaran terkecil di Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kunci dari penurunan kemiskinan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. PDRB merupakan suatu nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam waktu satu periode (Sasana, 2006). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sementara itu, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan PDRB di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk saat periode pendapatan tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapita suatu wilayah, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

**Tabel 1.4**  
**Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Banten Tahun 2010-2018 (Juta Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	10,681	11,077	11,629	12,162	12,703	13,387	14,828	15,675
2	Kab. Lebak	10,441	10,843	11,298	11,930	12,511	13,128	14,515	15,282
3	Kab. Tangerang	20,498	20,950	21,583	22,188	22,613	23,076	24,508	24,953
4	Kab. Serang	24,123	25,036	26,121	27,663	28,911	30,133	32,917	34,488
5	Kota Tangerang	37,207	38,434	40,106	41,981	43,094	44,360	47,327	49,085
6	Kota Cilegon	119,277	123,491	130,754	140,591	141,281	145,585	156,257	162,986
7	Kota Serang	21,720	22,719	23,867	25,324	26,533	27,672	30,234	31,660
8	Kota Tangerang Selatan	23,657	24,496	25,685	27,193	28,406	29,461	31,674	32,976
9	Banten	267,604	277,046	291,043	309,032	316,052	326,802	352,26	367,105

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pendapatan per kapita di kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018. Setiap tahunnya tercatat bahwa pendapatan per kapita di Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nilai pendapatan per kapita ini dihitung dari banyaknya jumlah pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin banyak peningkatan jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan suatu daerah maka akan terjadi penurunan nilai pendapatan per kapita di daerah tersebut. Pada tahun 2010 jumlah pendapatan per kapitanya sebesar 267,604 juta Rupiah. Pada tahun 2011 pendapatan per kapitanya naik menjadi sebesar 277,046 juta Rupiah, Selanjutnya Pada tahun 2012 pendapatan per kapita Provinsi Banten kembali mengalami kenaikan menjadi 291,043 juta Rupiah. Pada tahun 2013 kenaikan pendapatan per kapita di provinsi banten menjadi sebesar 309,032 juta Rupiah. Hal ini

terus terjadi hingga tahun 2018 menjadi jumlah terbesar kenaikan pendapatan per kapita di wilayah banten sebesar 367,105 juta Rupiah.

Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan suatu daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakatnya, pemerintah tidak dapat melakukannya secara sendiri karena keterbatasan modal yang dimiliki. Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian nasional. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif (Syahputra, Hamzah, dan Nasir, 2017).

Akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Untuk itu negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan akumulasi modal yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian. Investasi diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pembangunan ekonomi maka peran Penanaman Modal Asing (PMA) sangat diharapkan. PMA dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri (Thirafi, 2013).



**Tabel 1.5**  
**Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Banten Tahun 2010-2018 (Ribu US\$)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	0,00	4633,80	0,00	0,00	0,00	372,50	12,90	7245,30
2	Kab. Lebak	4003,50	10352,60	28509,40	146965,50	266463,40	393265,90	3943,60	30115,30
3	Kab. Tangerang	153182,10	420523,80	633547,40	726460,30	460143,80	508607,10	785355,30	984945,40
4	Kab. Serang	112144,10	347530,80	246897,90	544516,50	603050,30	614802,90	505235,30	268016,80
5	Kota Tangerang	1058146,10	186474,10	198952,60	193255,30	170754,70	153263,50	212247,20	227487,70
6	Kota Cilegon	187964,70	1167797,60	1583416,30	2069485,80	522924,80	733394,80	903192,20	760767,60
7	Kota Serang	28748,00	30083,30	14087,80	7273,70	2770,50	34074,20	484720,40	497732,80
8	Kota Tangerang Selatan	0,00	4296,00	10852,30	32253,20	8519,60	104187,60	152762,60	50964,50
9	Banten	1544188,5	2171692	2716263,7	3720210,3	2034627,1	2541968,5	3047469,5	2827275,4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tabel 1.5 menunjukkan realisasi PMA kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018. Masuknya investor asing ke suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi pembangunan yang lebih dibandingkan daerah lain, semakin tinggi PMA yang masuk ke daerah tersebut maka semakin besar pula pendapatan atau keuntungan yang ditawarkan daerah tersebut kepada pihak asing. Tahun 2017 tercatat sebagai tahun dengan investasi asing terbesar yang masuk ke Provinsi Banten sebesar 3047469,5 US\$. Sedangkan investasi terendah tercatat pada tahun 2010 sebesar 1544188,5 US\$.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**  
**Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2018 (Juta Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	Kab. Pandeglang	1572464,80	0,00	0,00	0,00	132364,00	182387,00	444705,50	310223,40
2	Kab. Lebak	0,00	2160,00	0,00	52264,70	74182,80	137633,50	5359,00	355,60
3	Kab. Tangerang	56007,70	865109,60	332700,30	572583,50	4845967,50	2064478,00	5340184,80	8135633,00
4	Kab. Serang	3544014,80	535897,40	229383,40	236825,10	384909,60	3286554,90	3451312,60	2382189,30
5	Kota Tangerang	536429,10	271652,30	756914,00	145657,30	44528,50	529327,30	1881900,40	1146347,60
6	Kota Cilegon	140102,80	2473925,80	3797574,60	2940431,20	2532856,00	4508505,80	3315784,60	4097963,40
7	Kota Serang	3500,00	144970,60	0,00	61100,00	0,00	1009,90	241982,60	341348,50
8	Kota Tangerang Selatan	0,00	4855,00	962,70	0,00	66490,00	0,00	460675,20	2223500,00
9	Banten	5852519,20	4298570,70	5117535,00	4008861,80	8081298,40	10709896,40	15141904,70	18637560,80

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa realisasi tingkat investasi penanaman modal dalam negeri kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018. Kenaikan PMDN lebih stabil dibandingkan dengan tingkat kenaikan investasi PMA yang masuk di Provinsi Banten. Hal ini dapat terjadi karena kebanyakan peraturan yang dibuat pemerintah lebih menguntungkan pihak dalam negeri dibandingkan pihak asing yang ingin masuk untuk berinvestasi di daerah tersebut. Tercatat pada tahun 2018 PMDN yang masuk di Provinsi Banten sebesar 18637 juta Rupiah. Sedangkan investasi PMDN terkecil terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 4298 juta Rupiah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di Provinsi Banten dalam periode 2010-2018 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Banten. Penelitian ini akan mengestimasi bagaimana pengaruh variabel jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan

perkapita dan tingkat investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa penanganan kemiskinan selalu dilakukan oleh setiap pemerintah di setiap daerah tak terkecuali di Provinsi Banten. Tingkat pengeluaran yang dilakukan pemerintah juga selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan di Provinsi Banten. Hal tersebut sejatinya dilakukan untuk menekan jumlah penduduk miskin, namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski tidak stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka pengangguran serta minimnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat dibandingkan jumlah kenaikan penduduknya.

Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, karena semakin tinggi jumlah pengangguran maka jumlah penduduk miskin juga semakin banyak. Sementara itu pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, di mana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan tingkat investasi yang juga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat investasi masuk ke daerah Provinsi Banten, semakin tinggi pula tambahan modal/dana daerah untuk memajukan laju pertumbuhan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa penanganan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten belum berjalan secara optimal dan kondisi tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Terkait hal tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2018.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengestimasi seberapa besar pengaruh jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah variabel jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2010-2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, di mana penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan secara empiris hubungan antara variabel ekonomi makro yang akan diuji yaitu jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

2. Manfaat praktis, di mana penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan saran dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Manfaat lainnya, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori investasi swasta, suku bunga, inflasi, nilai tukar, infrastruktur, upah tenaga kerja, dan investasi pemerintah serta berisi penelitian-penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, serta hasil analisis dan pembahasannya.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan baik objek maupun penelitian sebelumnya.